TINJAUAN ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 DI JAVA SUPERMALL SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Disusun Oleh :
Avilia Ayu Setyo Budi
NIM 6411415060

JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Semarang
September,2019

ABSTRAK

Avilia Ayu Setyo Budi
Tinjauan Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Java Supermall Semarang
VI+ 118 halaman+ 4 tabel+ 2 gambar+ 8 lampiran

Java *Supermall* Semarang merupakan pusat perbelanjaan menyediakan 86 tenant yang terdiri dari restoran, arena bermain anak-anak, supermarket, dan tempat belanja lainnya. Pusat perbelanjaan ini memiliki rata rata ± 3000 pengunjung/hari tidak tetap yang beragam dan 207 karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwa adanya adanya ketidaksesuaian terhadap kebijakan K3, identifikasi bahaya, pengendalian risiko bahaya, inspeksi K3 dan audit SMK di Java *Supermall* Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan. Instrumen yang digunakan adalah observasi secara terbuka menggunakan lembar observasi dan wawancara semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis* (deskriptif isi) untuk meninjau aspek K3 di Java *Supermall* Semarang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Java *Supermall* Semarang telah melaksanakan 43 dari total 64 butir aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 atau 67,1% pencapaian penerapan tingkat awal, dan termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik

Kata Kunci: Pusat Perbelanjaan, Aspek K3, SMK3
Kepustakaan : 20 (1996-2018)

Public Health Science Departement
Faculty of Sport Science
Universitas Negeri Semarang
September, 2019

ABSTRACT

Avilia Ayu Setyo Budi
Review of Occupational Safety and Health Aspects Based on Government Regulation Number 50 in 2012 at Java Supermall Semarang
VI + 118 page + 4 tables + 2 image + 8 attachments

Java Supermall Semarang is a shopping center providing 86 tenants consisting of restaurants, children's playgrounds, supermarkets, and other shopping venues. This shopping center has an average of ± 3000 diverse visitors / day and 207 employees. Based on the results of interviews and observations conducted by researchers that there are mismatches to the OSH policy, hazard identification, hazard risk control, OSH inspection and vocational audit at Java Supermall Semarang. The purpose of this study was to determine a review of occupational safety and health aspects based on Government Regulation Number 50 Year 2012 at Java Supermall Semarang.

This type of research is descriptive qualitative to describe the phenomena that occur in the field. The instrument used was open observation using observation sheets and semi-structured interviews using interview guidelines. Informants in this study were determined by purposive sampling technique. The data collected was analyzed descriptively qualitatively with the method of content analysis (descriptive content) to review aspects of K3 in Java Supermall Semarang. The results of this study indicate that Java Supermall Semarang has implemented 43 out of a total of 64 items of occupational safety and health aspects based on Government Regulation Number 50 Year 2012 or 67,1% achievement of the initial application level, and is included in the category of companies with a good application evaluation level

Keywords:Shopping Center, K3 aspects, SMK3
Literature: 20 (1996-2018)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atas pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka.

Semarang, 12 September 2019

Penulis,

METERAI TEMPEL

864E0AEF262959180

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Avilia Ayu Setyo Budi

NIM. 6411415060

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang" yang disusun oleh Avilia Ayu Setyo Budi, NIM 6411415060 telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang yang dilaksanakan pada:

Hari.tanggal : Senin, 7 Oktober 2019

Tempat : Ruang Ujian Jurusan IKM B

Panitia Ujian:

Ketua Panitia, Sekretaris,

Bidiyo Rahayu, M.Pd Muhammad Azinar, S.KM., M.Kes.

NIP 196107201984032001 NIP 198205182012121002

	Dewan Penguji:	Tanggal
Penguji I,	Evi Widowati, S.KM., M.Kes. NIP. 198302062008122003	16/10/2019
Penguji 2,	Drs. Herry Koesyanto, M.S. NIP. 195801122198601 1001	23/10/2019
Penguji 3,	dr. Anik Setyo Wahyuningsih, M.Kes. NIP. 197409032006042001	29/10/2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S. Al-Baqoroh: 286).
2. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. As-Syarh: 6).

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda Budi Waluyo dan Ibunda Sofia
2. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan berkat-Nya, sehingga tersusun skripsi yang berjudul "Tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 di Java *Supermall* semarang" dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Semarang.

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi ini, dengan rendah hati disampaikan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Tandiyo Rahayu M.Pd., atas Surat Keputusan penetapan Dosen Pembimbing Skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Bapak Irwan Budiono, S.KM. M.Kes., atas persetujuan penelitian ini.
3. Pembimbing I, Ibu dr. Anik Setyo Wahyuningsih, M.Kes., atas bimbingan dan saran dalam perbaikan skripsi.
4. Manager Operasional Java *Supermall* Semarang Bapak Dewanto, atas ijin penelitian.
5. Kepala Penanggungjawab MKG Java *Supermall* Semarang Bapak Udin, atas informasi terkait sarana penyelamatan.

6. Ibunda Sofia dan Ayahanda Budi Waluyo, atas do'a, motivasi, semangat, kasih sayangnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2015, atas kebersamaan, semangat, dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 14 September 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 7
1.2.1 Rumusan Masalah Umum 7
1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 7
1.3 TUJUAN 7
1.3.1 Tujuan Umum 7
1.3.2 Tujuan Khusus 8
1.4 MANFAAT 8
1.4.1 Untuk Peneliti 8
1.4.2 Untuk Java *Supermall* Semarang 8
1.4.3 Untuk Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 8
1.5 KEASLIAN PENELITIAN 9
1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 11
1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 11
1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 11
1.6.3 Ruang Lingkup Materi 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12
2.1 LANDASAN TEORI 12
2.1.1 BANGUNAN GEDUNG 12
2.1.2 POTENSI BAHAYA 18
2.1.3 KEBAKARAN..... 20
2.1.4 KECELAKAAN KERJA 21
2.1.5 RISIKO 24
2.1.6 PENDEKATAN PENCEGAHAN KECELAKAAN 26
2.1.7 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)..... 29
2.1.8 KEBIJAKAN K3 32
2.1.9 IDENTIFIKASI BAHAYA (*HAZARD IDENTIFICATION*)..... 33
2.1.10 PENGENDALIAN RISIKO (*RISK CONTROL*) 36
2.1.11 INSPEKSI K3 38
2.1.12 INTERNAL AUDIT SMK3..... 41
2.2 KERANGKA TEORI..... 45
BAB III METODE PENELITIAN 47
3.1. ALUR PIKIR..... 47
3.2. FOKUS PENELITIAN..... 47
3.3. JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 47
3.4 SUMBER INFORMASI..... 48
3.4.1. Data Primer 48
3.4.2. Data Sekunder..... 50
3.5. INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA. 51
3.5.1. Instrumen Penelitian 51
3.5.2 Teknik Pengambilan Data..... 52
3.6. PROSEDUR PENELITIAN..... 52
3.6.1 Tahap Pra Penelitian 52
3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian..... 53
3.6.3 Tahap Pasca Penelitian 53
3.7 PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA..... 54

3.8.1 *Data Reduction* (Reduksi Data) 55
3.8.2 *Data Display* (Penyajian Data) 55
3.8.3 *Conclusion Drawing atau Verification* 56
BAB IV HASIL PENELITIAN 57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 57
4.1.1 Struktur Organisasi 58
4.2 Hasil Penelitian 62
4.2.1 Karateristik Informan 62
BAB V PEMBAHASAN 80
5.1 Pembahasan 80
5.1.1 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 80
5.1.2 Identifikasi Potensi Bahaya 82
5.1.3 Pengendalian Risiko K3 84
5.1.4 Inspeksi K3 87
5.1.5 Audit SMK3 89
5.2 Hambatan dan Kelemahan Penelitian 90
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 90
6.1 Simpulan 90
6.2 Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....11
Tabel 2.1 Penelitian Tingkat Penerapan SMK3..... 35
Tabel 4.1 Hasil Kriteria Penilaian Berdasarkan PP No,50 Tahun 2012..... 71
Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Tinjauan Aspek K3.....79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Siklus Manajemen.....32
Gambar 3.1 Alur Pikir.....47

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Lembar Wawancara..... 95
Lampiran 2. Lembar Penjelasan Kepada Calon Subjek.....105
Lampiran 3.Persetujuan Keikutsertaan dalam Penelitian.....107
Lampiran 4. Surat Keputusan Pembimbing.....108
Lampiran 5. Surat Ethical Clearence dari KEPK.....109
Lampiran 6.Surat Ijin Penelitian dari FIK.....110
Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....111
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian.....112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan pesatnya pembangunan di Indonesia, maka semakin banyak industri yang menggunakan teknologi yang maju dan modern. Hal ini menyebabkan makin banyak risiko yang akan dihadapi baik secara fisik maupun mental oleh tenaga kerja maupun pengusaha (Ali, 2009).

Gedung bertingkat di Indonesia saat ini masih banyak yang belum memenuhi standar bidang kontruksi dan bangunan yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Hal ini berkaitan dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Sering timbul anggapan bahwa K3 merupakan pemborosan, pengeluaran biaya yang sia-sia atau sekedar formalitas yang harus dipenuhi organisasi (Ramli, 2010a).

Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Kondisi perburuhan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ramli, 2010b).

Secara global, International Labour Organization (ILO) memperkirakan 1 orang pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja (Depkes, 2014). Angka kecelakaan kerja di Indonesia juga masih tinggi. Pada tahun 2017 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

mencatat bahwa total kecelakaan kerja sebanyak 123.000 kasus dengan klaim Rp 971 miliar. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai klaim sebanyak Rp 729 miliar. Pada tahun 2017 untuk wilayah Jawa Tengah Dra. Wika Bintang MM menjelaskan angka kecelakaan kerja sepanjang tahun 2017 angka kecelakaan kerja mencapai 1.468 kasus (BPJS, 2018).

Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, terlihat bahwa dari lebih dari 1.800 kejadian bencana pada periode tahun 2005 hingga 2015. Kejadian bencana berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, cuaca esktrim, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Kecenderungan kejadian bencana relatif terus meningkat (Amri, 2016).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat selama tahun 2018, terjadi 2572 kejadian bencana di Indonesia. Jumlah kejadian bencana di Indonesia paling banyak di Provinsi Jawa Tengah yaitu sejumlah 577 kejadian. Kejadian bencana tersebut mengakibatkan 45 orang meninggal & hilang, 160 orang luka-luka, dan 1.887.361 orang terdampak & mengungsi. Kemudian, kejadian kebakaran di wilayah Kota Semarang pada tahun 2018 meningkat yaitu sejumlah 409 kebakaran dengan kerugian sebanyak Rp.19.157.730.000. Pada bangunan umum terjadi 5 kejadian kebakaran pada tahun 2018 (Semarang, 2018).

Hampir setiap jenis bangunan dan hampir setiap negara di dunia telah mengalami sejarah kebakaran yang dahsyat. Seperti pada kasus kebakaran *Mall* di Rusia yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2018 menyebabkan 64 orang meninggal dunia diantaranya 11 anak-anak. Penyebab kejadian ini adanya

konsleting listrik di tempat bermain anak-anak. Beberapa pengunjung panik dan harus mencari jalan keluar sendiri dari lantai atas *mall* yang telah dipenuhi oleh asap. Selain itu, terdapat kejadian kebakaran Mall di Siberia pada tahun 2018 menyebabkan 39 orang meninggal dunia dan kebakaran di Central World Bangkok pada tahun 2019 menyebabkan 2 orang meninggal dunia (Santi, 2018).

Dari tahun 2014-2019 terdapat 13 kejadian kebakaran sebuah *mall* di Indonesia tidak menimbulkan korban jiwa namun menyebabkan kerugian finansial. Kerugian finansial akibat kebakaran seperti yang dialami oleh Pemerintahan Kabupaten Kudus. Berdasarkan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, Pemkab mencatat nilai kerugian kebakaran gedung Plasa Kudus termasuk Matahari *Department Store* yang terjadi pada tanggal 26 Februari 2018 sebanyak Rp 22,6 miliar (Hazami, 2018).

Untuk mencegah kecelakaan yang ditimbulkan karena adanya suatu bahaya di lingkungan kerja perlunya upaya keselamatan kesehatan kerja yang diatur dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Ramli, 2010b).

Ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Permenaker RI. No. Per. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa ”Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat

mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Permenaker, 1996).

Selanjutnya undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2 bahwa "Setiap perusahaan wajib menerapkan upaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja", maka perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan program-program yang dapat mengurangi angka kecelakaan kerja di perusahaan. Salah satu programnya adalah program Keselamatan dan Kesehatan Kerja para tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Pelealu, Tjakra, & Sompie (2015), tentang Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus: Proyek The Lagoon Tamansari Bahu *Mall*). Penerapan aspek hukum terhadap K3 pada proyek ini sudah baik karena setiap elemen K3 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berpengaruh baik kepada tenaga kerja maupun perusahaan karena dapat menghindari kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja dalam proyek the Lagoon Tamansari.

Di Semarang terdapat beberapa *mall* yang memiliki banyak pengunjung seperti Paragon *City Mall*, *Mall* Ciputra, Java *Supermall*, dan DP *Mall*. Hasil observasi mengenai K3 di *mall* Semarang yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Java *Supermall* beberapa sarana keselamatan gedung belum sesuai standar daripada *mall* lainnya. Beberapa pengunjung dan pekerja di Java *Supermall* tidak

mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul. Oleh karena itu, Java *Supermall* Semarang menjadi tempat penelitian ini.

Java *Supermall* merupakan gedung bertingkat yang berlokasi di Jl. MT.Haryono No.992-994 Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Dibangun pada tahun 1996 dan mulai beroperasional pada tahun 2000 di atas lahan seluas 10.683 m^2. Jam operasionalnya dari pukul 10:00 WIB sampai pukul 21:00 WIB (*Profil Java Supermall Semarang*, 2019).

Java *Supermall* Semarang merupakan pusat perbelanjaan menyediakan 86 tenant yang terdiri dari restoran, arena bermain anak-anak, supermarket, dan tempat belanja lainnya. Masing-masing tenant menghasilkan omset per hari sebesar ± Rp.1.000.000 hingga ± Rp.2.700.000. Jika terjadi suatu kejadian bencana di Java *Supermall* Semarang, total kerugian yang didapat lebih dari Rp.232.000.000 per hari.

Selain itu, sering kali Java *Supermall* Semarang mengadakan beraneka ragam pameran yang menjadi pusat perhatian warga Semarang untuk datang ke Java *Supermall* Semarang. Pusat perbelanjaan ini memiliki rata rata ± 3000 pengunjung/hari tidak tetap yang beragam dan 207 karyawan. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan, usia, kondisi fisik, kesehatan, pendidikan, dan pengetahuan. Karyawan terdiri dari *inhouse* (86 orang), *outsourcing* (90 orang), dan *staff management* (31 orang) (*Profil Java Supermall Semarang*, 2019).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 22 Februari 2019 dengan Bapak Dewanto selaku *manager* operasional, penulis memperoleh hasil bahwa di Java Supermall Kota Semarang *"Zero Accident"* dan belum pernah

terjadi bencana dari berdirinya Java *Supermall* pada tahun 2000. Namun terdapat aktivitas di Java *Supermall* yang menimbulkan potensi bahaya, antara lain pada saat penerimaan barang datang dan pemindahan barang terdapat potensi bahaya mekanis dan ergonomi seperti terjepit, dan angkat beban terlalu lama. Kemudian saat mengolah bahan terdapat potensi bahaya listrik, dan kimiawi seperti timbulnya kebakaran akibat listrik dan kebakaran akibat kebocoran gas. Saat menyajikan produk terdapat potensi bahaya ergonomi seperti berdiri terlalu lama yang mengakibatkan pegal-pegal.

Dari hasil observasi awal dan wawancara dengan Bapak Udin selaku penanggungjawab MKG di Java *Supermall* Semarang yang peneliti lakukan pada tanggal 8 Maret 2019 di Java *Supermall* Semarang, penulis memperoleh hasil bahwa pekerja belum pernah melakukan pelatihan K3, adanya sarana penyelamatan, dan sarana proteksi aktif yang tidak sesuai dengan standar. Seperti adanya pagar besi pada tangga darurat yang menghalangi jalur evakuasi dan penempatan APAR yang tidak sesuai. *Lift* juga tidak berfungsi dengan baik, seperti tidak terdapat petunjuk tombol darurat, dan 7 orang pekerja pernah mengalami terjebak di dalam *lift* tersebut. Sarana dan prasarana di Java *Supermall* Semarang dilakukan pengecekan namun tidak terdapat dokumen inspeksi.

Beberapa risiko yang dapat terjadi di Java Supermall Semarang yaitu risiko keuangan apabila adanya kecelakaan kerja yang dapat menghentikan proses kerja. Lalu adanya risiko kebakaran karena adanya potensi bahaya listrik. Terdapat pula risiko sosial seperti budaya kurang peduli akan keselamatan di masyarakat akan mempengaruhi keselamatan operasi perusahaan (Ramli, 2010b).

Dengan adanya ketidaksesuaian terhadap kebijakan K3, identifikasi bahaya, pengendalian risiko bahaya, inspeksi K3 dan audit SMK3, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Bagaimana tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang?

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus

1. Bagaimana kebijakan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di Java *Supermall* Semarang?
2. Bagaimana identifikasi bahaya di Java *Supermall* Semarang?
3. Bagaimana pengendalian risiko bahaya di Java *Supermall* Semarang?
4. Bagaimana inspeksi yang berkaitan dengan tujuan sasaran K3 di Java *Supermall* Semarang?
5. Bagaimana audit sistem manajemen K3 di Java *Supermall* Semarang?

1.3 TUJUAN

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kebijakan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di Java *Supermall* Semarang.
2. Untuk mengetahui identifikasi bahaya di Java *Supermall* Semarang.
3. Untuk mengetahui pengendalian risiko bahaya di Java *Supermall* Semarang.
4. Untuk mengetahui inspeksi yang berkaitan dengan tujuan sasaran K3 di Java *Supermall* Semarang.
5. Untuk mengetahui audit sistem manajemen K3 di Java *Supermall* Semarang.

1.4 MANFAAT

1.4.1 Untuk Peneliti

Penelitian ini sebagai media belajar yang akan menambah wawasan mengenai bidang keselamatan dan kesehatan kerja terutama pada aspek K3.

1.4.2 Untuk Java *Supermall* Semarang

Penelitian yang akan dilakukan dapat digunakan sebagai masukan pada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

1.4.3 Untuk Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini akan menambah referensi mengenai bidang keselamatan dan kesehatan kerja terutama pada aspek K3 di bangunan umum. Selain itu, dapat menjalin kerjasama antara jurusan Kesehatan Masyarakat dengan Java *Supermall* Semarang.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tahun dan Tempat Penelitian	Desain Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	Analisis Struktur Bangunan Yang Ditinjau Dari Tangga Darurat Pada Pusat Perbelanjaan Mesra Indah *Mall* Samarinda	Muhammad Septian Hadi	2015, di pusat perbelanjaan Mesra Indah *Mall* Samarinda	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif	Komitmen manajemen terhadap penerapan tangga darurat kebakaran dan tangga darurat.	Komitmen manajemen Mesra Indah *Mall* terhadap penerapan tangga darurat kebakaran adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana evakuasi di area mall seperti pengadaan tangga darurat, petunjuk jalur evakuasi, serta pengadaan sistem proteksi lain yang dapat mendukung aktivitas evakuasi.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
2.	Penerapan Aspek Hukum Terhadap	Christie Pricilia Pelealu	2015, The Lagoon Tamansari	Penelitian ini dilaksanakan melalui	Aspek hukum terhadap keselamat	Penerapan aspek hukum terhadap K3 pada proyek ini sudah baik

	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus: Proyek The Lagoon Tamansari Bahu *Mall*)	Bahu *Mall*	wawancara dan penyebaran kuesioner dengan sasaran responden nya adalah pekerja.	an dan kesehatan kerja.	karena setiap elemen K3 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun peraturan dan sangsi yang dikeluarkan oleh perusahaan, dalam hal ini PT.Wika Gedung. Hal ini berpengaruh baik kepada tenaga kerja maupun perusahaan karena dapatmenghindari kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja dalam proyek the Lagoon Tamansari.

Dari keaslian penelitian di atas, ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengenai tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang dan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.
2. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di Java *Supermall* Kota Semarang.

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada Juli 2019-Agustus 2019.

1.6.3 Ruang Lingkup Materi

Materi dalam penelitian ini adalah aspek keselamatan dan kesehatan kerja

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 BANGUNAN GEDUNG

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (Permen PU No. 26/PRT/M/2008).

Dengan pengertian bangunan gedung tersebut maka sistem keamanan pada bangunan gedung sangat penting, karena bangunan gedung tersebut sslalu digunakan oleh manusia, sehingga sistem keamanan penting untuk keselamatan para penghuni atau pengguna bangunan gedung tersebut. Salah satu bentuk sistem keamanan pada bangunan gedung adalah jalan atau jalur penyelamatan. Ini diperlukan untuk menghadapi keadaan – keadaan darurat yang dapat mengancam keselamatan gedung, manusia, maupun perabot di dalamnya.

Keadaan darurat adalah setiap peristiwa atau kejadian pada bangunan dan lingkungan sekelilingnya yang memaksa dilakukannya suatu tindakan segera. Dengan perkataan lain, keadaan darurat adalah suatu situasi yang terjadi mendadak dan tidak dikehendaki yang mengandung ancaman terhadap kehidupan,

aset, dan operasi perusahaan, serta lingkungan, dan oleh karena itu memerlukan tindakan segera untuk mengatasinya. Ada beberapa macam keadaan darurat yang terjadi pada suatu bangunan gedung. Diantara beberapa keadaan darurat itu adalah kebakaran, gempa bumi dan bencana alam lainnya, perbuatan jahat atau permusuhan terutama yang bersifat ancaman atau serangan menggunakan bom atau peledak lainnya. Keadaan darurat juga dapat berupa gangguan terhadap ketertiban umum seperti demonstrasi, huru – hara dan pembrontakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah keadaan darurat yang berkaitan dengan tidak berfungsinya instalasi seperti lift macet atau listrik padam.

2.1.1.1 Klasifikasi Bangunan

2.1.1.1.2 Klasifikasi Bangunan Berdasarkan Jenis Penggunaan Bangunan

Kelas bangunan adalah pembagian bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan jenis penggunaan bangunan. Klasifikasi bangunan ini dibedakan sebagai berikut: (Permen PU No. 26/PRT/M/2008)

1) Kelas 1 (Bangunan gedung hunian biasa)

1. Kelas 1a

Bangunan gedung hunian tunggal yang berupa satu rumah tinggal; atau satu atau lebih bangunan gedung gandeng, yang masing – masing bangunan gedungnya dipisahkan dengan satu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house, villa, atau

2. Kelas 1b

Rumah asrama atau *kost*, rumah tamu, hotel atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m² dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara

tetap, dan tidak terletak di atas atau di bawah bangunan gedung hunian lain atau bangunan kelas lain selain tempat garasi pribadi.

2) Kelas 2

Bangunan gedung hunian, terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing – masing merupakan tempat tinggal terpisah.

3) Kelas 3

Bangunan gedung hunian diluar bangunan gedung kelas 1 atau kelas 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk :

1. Rumah asrama, rumah tamu (*guest house*), losmen; atau
2. Bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atau
3. Bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; atau
4. Panti untuk lanjut usia, cacat atau anak – anak; atau
5. Bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan gedung perawatan kesehatan yang menampung karyawan – karyawannya.

4) Kelas 4 (Bangunan Gedung Hunian Campuran)

Tempat tinggal yang berada di dalam suatu bangunan gedung kelas 5, 6, 7, 8, atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan gedung tersebut.

5) Kelas 5 (Bangunan Gedung Kantor)

Bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan – tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial di luar bangunan gedung kelas 6, 7, 8 atau 9.

6) Kelas 6 (Bangunan Gedung Perdagangan)

Bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang – barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk :

1. Ruang makan, kafe, *restaurant*; atau
2. Ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau motel; atau
3. Tempat potong rambut/salon, tempat cuci umum; atau
4. Pasar, ruang penjualan, ruang pamer, atau bengkel.

7) Kelas 7 (Bangunan Gedung Penyimpanan Gudang)

Bangunan gedung yang dipergunakan untuk penyimpanan termasuk tempat parkir umum, gudang, tempat pamer barang–barang produksi untuk dijual atau cuci gudang.

8) Kelas 8 (Bangunan Gedung Laboratorium/Industri/Pabrik)

Bangunan gedung laboratorium dan bangunan gedung yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produk, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, *finishing*, atau penjualan.

9) Kelas 9 (Bangunan Gedung Umum)

Bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu :

1. Kelas 9a

Bangunan gedung perawatan kesehatan, termasuk bagian – bagian dari bangunan gedung tersebut yang berupa laboratorium.

2. Kelas 9b

Bangunan gedung pertemuan, termasuk bengkel kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, bangunan gedung peribadatan, bangunan gedung budaya atau sejenis, tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan gedung yang merupakan kelas lain.

10) Kelas 10 (Bangunan Gedung atau Struktur yang Bukan Hunian)

1. Kelas 10a

Bangunan gedung bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, *carport*, atau sejenisnya.

2. Kelas 10b

Struktur yang berupa pagar, tonggak, antena, dinding penyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam renang, atau sejenisnya.

11) Bangunan Gedung yang Tidak Diklasifikasikan Khusus

Bangunan gedung atau bagian dari bangunan gedung yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan gedung 1 s.d 10 tersebut, dalam persyaratan teknis ini, dimaksudkan dengan klasifikasi yang mendekati sesuai peruntukannya.

12) Bangunan Gedung yang Penggunaannya Insidentil

Bagian bangunan gedung yang pengguanaannya insidentil dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian bangunan gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan gedung utamanya.

13) Klasifikasi Jamak

Bangunan gedung dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapa bagian dari bangunan gedung harus diklasifikasikan secara terpisah dari :

1. Bila bagian gedung yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi 10% dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan gedung, dan bukan laboratorium, klasifikasinya disamakan dengan klasifikasi bangunan gedung utamanya.

2. Kelas – kelas : 1a, 1b, 9a, 9b, 10a, dan 10b, adalah klasifikasi yang terpisah; ruang – ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin *lift*, ruang boiler (ketel uap) atau sejenisnya, diklasifikasi sama dengan bagian bangunan gedung dimana ruang tersebut terletak.

2.1.1.1.2 Klasifikasi Bangunan Berdasarkan Bahaya Kebakaran

Juwana (2005), membuat klasifikasi bangunan didasarkan pada kemungkinan bahaya kebakaran, yaitu mudah sulitnya api menjalar pada suatu bangunan gedung yang itu tergantung pada banyaknya bahan – bahan yang mudah terbakar pada gedung tersebut, dan kemampuan struktur bangunan untuk dapat bertahan terhadap api selama waktu yang telah ditentukan. Adapun klasifikasi bangunan itu adalah:

1) Bahaya Kebakaran Ringan

Bangunan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, dan kecepatan menjalarnya api lambat.

2) Bahaya Kebakaran Rendah Kelompok I

Bangunan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar rendah, penimbunan bahan yang mudah terbakar sedang dengan tinggi tidak lebih dari 2,50 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, penjalaran api sedang.

Contoh : bangunan yang fungsinya bukan bangunan industri, dan memiliki ruangan terbesar tidak melebihi 125 m^2.

3) Bahaya Kebakaran Sedang Kelompok II

Bangunan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4,00 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah bangunan komersial dan industri yang berisi bahan – bahan yang dapat terbakar.

4) Bahaya Kebakaran Sedang Kelompok III

Bangunan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas yang tinggi, sehingga menjalarnya api cepat.

5) Bahaya Kebakaran Berat

Bangunan yang mempunyai nilai kemudahan kebakaran tinggi, apabila terjadi kebakaran akan melepaskan panas yang tinggi dan penjalaran api yang cepat. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah bangunan komersial dan bangunan industri yang berisi bahan – bahan yang mudah terbakar, seperti karet busa, cat, spritus dan bahan bakar lainnya.

2.1.2 POTENSI BAHAYA

Menurut Tarwaka (2014) potensi bahaya adalah suatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cidera, sakit, kecelakaan atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Setiap proses produksi, peralatan atau mesin dan tempat kerja yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk selalu mengandung potensi bahaya

tertentu, yang apabila tidak mendapatkan perhatian secara khusus dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Potensi bahaya ini berasal dari berbagai kegiatan atau aktivitas dalam pelaksanaan operasi pekerjaan atau berasal dari luar proses kerja (Tarwaka, 2014).

Menurut Suwandi (2018) faktor bahaya di lingkungan kerja secara umum dapat di golongkan menjadi 5, yaitu :

1. Faktor fisika yang terdiri dari bising, getaran, radiasi, penenrangan kurang baik, dan temperatur ekstrim.
2. Faktor kimia yang terdiri dari gas, uap debu, kabut, cairan, dan benda padat.
3. Faktor biologi yang terdiri dari virus, bakteri, jamur, parasit, serangga, dan binatang lainnya.
4. Faktor ergonomi yang terdiri dari berdiri lama atau berlebihan, salah gerakan, angkat beban terlalu berat, pekerjaan monoton, dan konstruksi mesin tidak ergonomi.
5. Faktor psikologi yang terdiri dari hubungan antar tenaga kerja, suasana lingkungan kerja, dan lain-lain.

Semua kegiatan yang berlangsung baik pada perumahan, industri, pusat perbelanjaan, dan lainnya memiliki potensi yang cukup besar untuk mengalami kebakaran. Namun, manusia justru akan membahayakan nyawanya sendiri, antara lain: (Anizar, 2012)

1. Makin sedikitnya ruang terbuka yang dapat berfungsi sebagai barrier/penghalang menjalarnya kebakaran ataupun sebagai tempat operasi pemadaman kebakaran.

2. Makin sulitnya dijumpai sumber-sumber air untuk keperluan pemadaman.
3. Jumlah dan sebaran hidran kota yang masih belum memadai.
4. Kondisi dan peralatan aparat pemdaman kebakaran yang belum lengkap, terutama untuk menghadapi kebakaran bangunan tinggi/bertingkat banyak.
5. Makin sulit mendekati lokasi kebakaran, oleh sebab kepadatan kompleksitas bangunan, serta kemacetan lalu lintas.
6. Perubahan yang cepat pada fungsi bangunan/ruang, yang tidak diimbangi dengan penyesuaian sarana penanggulangan kebakaran sehingga risiko kebakaran meningkat.
7. Banyak gedung yang tidak memiliki sarana pengaman kebakaran yang lengkap (deteksi, alarm, sprinkler, dan hidran)
8. Banyak gedung yang kurang memperhatikan pentingnya sarana jalan keluar yang aman. Bila ada, sebagian besar sering kurang terpelihara atau telah berubah fungsi.
9. Aspek pemeliharaan dan pemeriksaan keandalan.
10. Latihan kebakaran sebagai kegiatan rutin masih jarang, bahkan sering tidak dilakukan.

2.1.3 KEBAKARAN

2.1.3.1 Segitiga Api

Dalam ilmu kebakaran, segitiga api merupakan sebuah bangun dua dimensi berbentuk segitiga sama sisi, yaitu oksigen, panas, dan bahan bakar. Suatu peristiwa/reaksi pembakaran akan dapat terjadi apabila ketiga komponen tersebut berada dalam kondisi dimana akan terjadi pembakaran/api memliki

perbandingan tertentu antara bahan dimaksud dengn oksigen yang harus tersedia (Anizar, 2012).

2.1.3.2 Faktor Penyebab Kebakaran

Secara umum penyebab kebakaran di gedung bertingkat adalah sebagai berikut: (Ramli, 2010a)

2.1.3.2.1 Faktor Teknis

Hal ini berkaitan dengan instalasi listrik, mesin, peralatan listrik seperti pembangkit tenaga lift dan elevator.

2.1.3.2.2 Faktor Manusia

Hal ini berkaitan dengan perilaku penghuni, cara kerja tidak aman dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh penghuni atau pengunjung gedung.

2.1.4 KECELAKAAN KERJA

2.1.4.1Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan menurut M. Sulaksmono (1997) dalam Anizar (2012) adalah suatu kejadian tak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Kecelakaan timbul sebagai akibat dari pengelolaan potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah.

Menurut Tarwaka (2014) mengemukakan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya.

Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan (Anizar, 2012).

2.1.4.2 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Potensi bahaya dan risiko di tempat kerja yang tidak dikendalikan akan menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan kerja yang akan menimbulkan kerugian yang besar, baik itu kerugian material dan fisik (Anizar, 2012). Menurut Ramli (2010) kerugian akibat kecelakaan kerja dikategorikan menjadi 2, yaitu:

2.1.4.2.1 Kerugian Langsung

Kerugian langsung adalah Suatu kerugian yang dapat dihitung secara langsung dari mulai terjadi peristiwa sampai dengan tahap rehabilitasi (Tarwaka, 2014). Kerugian langsung dibagi menjadi dua, yaitu:

2.1.4.2.1.1 Biaya Pengobatan dan Kompensasi

Kecelakaan mengakibatkan cidera, baik cedera ringan, berat, cacat dan menimbulkan kematian. Cidera ini akan mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mempengaruhi produktivitasnya. Jika terjadi kecelakaan perusahaan harus mengeluarkan biaya pengebotan dan tunjangan kecelakaan sesuai sesuai ketentuan yang berlaku (Ramli, 2010).

2.1.4.2.1.2 Kerusakan Sarana Produksi

Kerugian langsung lainnya adalah kerusakan sarana produksi akibat kecelakaan seperti kebakaran, peledakan dan kerusakan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan kerusakan (Ramli, 2010).

2.1.4.2.2 Kerugian Tidak Langsung

Menurut Tarwaka (2014) kerugian tidak langsung adalah kerugian berupa biaya yang dikeluarkan dan meliputi suatu yang tidak terlihat pada waktu atau beberapa waktu setelah terjadinya kecelakaan. Kerugian tidak langsung di bagi menjadi 4, yaitu:

2.1.4.2.2.1 Kerugian Jam Kerja

Jika terjadi kecelakaan kerja, kegiatan produksi akan terhenti sementara untuk membantu korban yang cidera, penanggulangan kejadian, perbaikan kerusakan atau penyelidikan kejadian. Kerugian jam kerja yang hilang akibat kecelakaan jumlahnya cukup besar yang dapat mempengearuhi produktivitas (Ramli, 2010).

2.1.4.2.2.2 Kerugian Produksi

Kecelakaan juga menyebabkan kerugian terhadap proses produksi akibat kerusakan atau cidera pada pekerja. Perusahaan tidak bisa berproduksi sementara waktu sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan (Ramli, 2010).

2.1.4.2.2.3 Kerugian Sosial

Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak sosial baik terhadap keluarga korban yang terkait langsung, maupun lingkungan sosial sekitarnya. Apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan, keluarganya akan turut menderita. Bila korban tidak mampu bekerja atau meninggal, maka keluarga akan kehilangan sumber kehidupan, keluarga terlantar yang dapat menimbulkan kesengsaraan (Ramli, 2010).

2.1.4.2.2.4 Citra dan Kepercayaan Konsumen

Kecelakaan menimbulkan citra negatif bagi organisasi karena dinilai tidak peduli keselamatan, tidak aman atau merusak lingkungan. Citra ini dapat rusak dalam sekejap jika terjadi bencana atau kecelakaanyang berdampak luas. Sebagai akibatnya, masyarakat akan meninggalkan bahkan mungkin akan memboikot setiap produk dari perusahaan tersebut. Sebaliknya perusahaan yang peduli K3 akan dihargai dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan penanam modal (Ramli, 2010).

2.1.5 RISIKO

2.1.5.1 Pengertian Risiko

Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cidera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut (Ramli, 2010). Menurut Tarwaka (2014) risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Sedangkan tingkat risiko merupakan perkalian antara tingkat kekerapan (*probability*) dan keparahan (*consequences* atau *severity*) dari suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian, kecelakaan atau cedera dan sakit yang mungkin timbul dari pemaparan suatu bahaya di tempat kerja.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Risiko

Jenis-jenis risiko menurut Ramli (2010), antara lain:

2.1.5.2.1. Risiko Keuangan (Financial Risk)

Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai risiko keuangan yang berkaitan dengan aspek keuangan. Terdapat berbagai risiko keuangan, seperti piutang macet, perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang dan lain-lain (Ramli, 2010).

2.1.5.2.2. Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko pasar atau market risk dapat terjadi terhadap perusahaan yang produknya dikonsumsi atau digunakan secara luas oleh masyarakat. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap produk dan jasa yang dihasilkannya (Ramli, 2010).

2.1.5.2.3. Risiko Alam (Natural Risk)

Risiko alam atau *natural risk* dapat berupa bencana alam yang merupakan risiko yang dihadapi oleh siapa saja dan dapat terjadi setiap saat tanpa bisa diduga waktu, bentuk dan kekuatannya. Risiko alam ini menjadi salah satu ancaman bisnis global. Bencana alam yang terjadi dapat berupa gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin atau badai dan letusan gunung berapi (Ramli, 2010).

2.1.5.2.4. Risiko Operasional

Risiko operasional dalam perusahaan tergantung dari jenis, bentuk dan skala bisnis. Risiko ini berasal dari kegiatan operasional yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola perusahaan yang baik dan benar. Risiko operasional contohnya ketenagakerjaan, teknologi dan risiko K3 (Ramli, 2010).

2.1.5.2.5. Risiko Keamanan (Security Risk)

Masalah keamanan dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha kegiatan suatu perusahaan seperti pencurian aset perusahaan, data informasi, data keuangan dan lain sebagainya. Risiko ini dapat dikurangi dengan menerapkan sistem manajemen keamanan dengan pendekatan risiko (Ramli, 2010).

2.1.5.2.6. Risiko Sosial

Risiko sosial merupakan risiko yang timbul dan berkaitan dengan lingkungan sosial dimana organisasi atau perusahaan beroperasi. Aspek sosial budaya seperti tingkat kesejahteraan, latar belakang budaya dan pendidikan dapat menimbulkan risiko positif dan negatif. Budaya kurang peduli akan keselamatan di masyarakat akan mempengaruhi keselamatan operasi perusahaan (Ramli, 2010).

2.1.6 PENDEKATAN PENCEGAHAN KECELAKAAN

Prinsip mencegah kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan faktor penyebab kecelakaan yang disebut tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Namun, berdasarkan teori domino dalam praktik pencegahan kecelakaan kerja tidak semudah yang dibayangkan karena menyangkut berbagai unsur yang saling terkait mulai dari penyebab langsung, penyebab dasar dan latar belakang. Terdapat berbagai pendekatan dalam pencegahan kecelakaan, antara lain (Ramli, 2010) :

2.1.6.1 Pendekatan Energi

Sesuai dengan konsep energi, kecelakaan bermula karena adanya sumber energi yang mengalir mencapai penerima *(recepient*).

Karena itu pendekatan energi mengendalikan kecelakaan melalui 3 titik, yaitu:

2.1.6.1.1 Pengendalian pada Sumber Bahaya

Bahaya yang menjadi sumber terjadinya kecelakaan dapat dikendalikan langsung pada sumbernya dengan melakukan pengendalian secara teknis atau administratif. Sebagai contoh pengendalian pada sumbernya adalah mesin uang bising dapat dikendalikan dengan mematikan mesin, mengurangi tingkat kebisingan, memodifikasi mesin, memasang peredam pada mesin yang lebih rendah tingkat kebisingannya (Ramli, 2010).

2.1.6.1.2 Pendekatan pada Jalan Energi

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penetrasi pada jalan energi, sehingga intensitas energi mengalir ke penerima dapat dikurangi, contohnya seperti kebisingan dapat dikurangi tingkat bahayanya dengan memasang dinding kedap suara, menjauhkan manusia dari sumber bisisng, atau mengurangi waktu paparan (Ramli, 2010).

2.1.6.1.3. Pengendalian pada Penerima

Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian terhadap penerima baik manusia, benda atau material, jika pengendalian pada sumber dan energi tiak dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, perlindungan diberikan dengan kepada penerima dengan meningkatakan ketahanannya menerima energi yang datang (Ramli, 2010).

2.1.6.2 Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia didasarkan hasil statistik yang menyatakan bahwa 80 % kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia dengan tindakan

yang tidak aman. Karena itu, untuk mencegah kecelakaan kerja dilakukan berbagai upaya pembinaan unsur manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga kesadaran K3 meningkat (Ramli, 2010).

2.1.6.3 Pendekatan Teknis

Pendekatan ini berhubungan dengan kondisi fisik, peralatan, material, proses maupun lingkungan kerja yang tidak aman. Untuk mencegah kecelakaan yang bersifat teknis dilakukan upaya keselamatan antara lain:

1. Rancang bangunan yang aman yang disesuaikan dengan persyaratan teknis dan standar yang berlaku untuk menjamin kelayakan peralatan kerja.
2. Sistem penanganan pada peralatan atau intalasi untuk mencegah kecelakaan dalam pengoperasian alat atau instalasi, misalnya tutup pengaman mesin, sistem *inter lock*, sistem alarm, sistem instrumentasi dan lain sebagainya (Ramli, 2010).

2.1.6.4 Pendekatan Administratif

Pendekatan administratif dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Pengaturan waktu dan jam kerja, sehingga tingkat kelelahan dan paparan bahaya dapat dikurangi.
2. Penyediaan alat keselamatan kerja.
3. Mengembangkan dan menetapkan prosedur dan peraturan tentang K3.
4. Mengatur pola kerja, sistem produksi dan proses kerja (Ramli, 2010).

2.1.6.5 Pendekatan Manajemen

Banyak kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor manajemen yang tidak kondusif, sehingga mendorong terjadinya kecelakaan. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain:

1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).
2. Mengembangkan organisasi K3 yang efektif.
3. Mengembangkan komitmen dan kepemimpinan dalam K3, khususnya untuk manajemen tingkat atas (Ramli, 2010).

2.1.7 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 merupakanbagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yaitu struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. (Ramli, 2013)

2.1.7.1 Tujuan SMK3

Tujuan dari penerapan SMK3 yaitu:

2.1.7.1.1 Sebagai Alat Ukur Kinerja K3 Dalam Organisasi

Sistem Manajemen K3 digunakan untuk menilai atau mengukur kinerja penerapan K3 dalam organisasi. Dengan melihat dari pencapaian K3 organisasi dapat mengetahui tingkat pencapaian K3. Pengukuran dapat dilakukan dengan audit sistem manajemen K3.

2.1.7.1.2 Sebagai Pedoman Implementasi K3 Dalam Organisasi

Sistem manajemen K3 dapat digunakan untuk pedoman dalam mengembangkan sistem manajemen K3. Beberapa bentuk sistem manajemen K3 yang dapat digunakan sebagai pedoman misalnya ILO OHSMS *Guidelines, American Petroleum Institute* (API), *Health Safety EexecutiveManagement System* (HSEMS),*Oiland Gas Producer* (OGP), *International Safety Rating System*(ISRS) dari DNV.

2.1.7.1.3 Sebagai Dasar Penghargaan (awards)

Sistem manajemen K3 juga dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3. Penghargaan diberikan oleh intansi pemerintah ataupun lembaga independen seperti *National Safety Council Award*, SMK3 dari Departemen Tenaga Kerja.

2.1.7.1.4 Sebagai Sertifikasi

Sistem manajemen K3 dapat digunakan untuk sertifikasi penerapan manajemen K3 dalam organisasi tersebut. Sertifikasi diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi. (Ramli, 2010)

2.1.7.2 Manfaat SMK3

Menurut (Tarwaka, 2014) manfaat penerapan SMK3 yaitu :

1. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden dan kerugian lainnya.
2. Dapat mengetahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di sebuah instansi.
3. Dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan bidang K3.

4. Dapat meningkatkan pengetahuai, ketrampilan dan kesadaran tentang K3.
5. Dapat meningkatkan produktivitas kerja.

2.1.7.3 Dasar Hukum SMK3

Sistem manajemen K3 menjadi kebijakan Nasional di Indonesia. Pada tahun 1996 pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai SMK3 melalui Pemenaker No. 5 Tahun 1996. Selanjutnya penerapan SMK3 diperkuat dengan dimasukannya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan perkembangan dan peningkatan kesadaran masyarakat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 maka Permenaker No. 5 Tahun 1996 tersebut tidak berlaku. Pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 juga mengatur tentang kriteria audit SMK3 yang dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk pemerintah. (Ramli, 2013)

2.1.7.4 Proses SMK3

Menurut Soehatman Ramli, 2013 proses Sistem Manajemen K3 merupakan suatu siklus majamenen yang terdiri dari :

2.1.7.4.1 Penetapan Kebijakan K3

Proses SMK3 dimulai dengan menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2.1.7.4.2 Perencanaan K3

Merencanakan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

2.1.7.4.3 Pelaksanaan Rencana K3

Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2.1.7.4.4 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

2.1.7.4.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

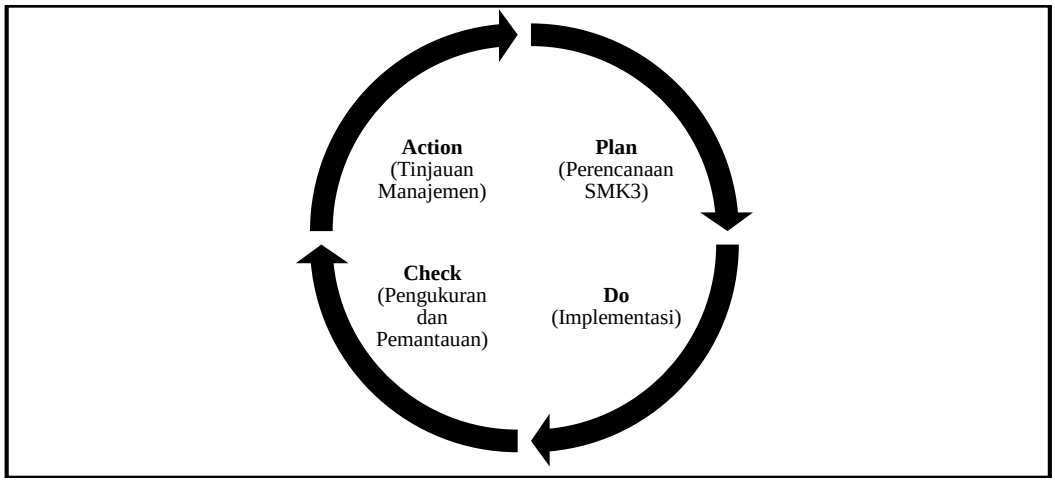

Gambar 2.1 Siklus Manajemen
Sumber : Soehatman Ramli, 2010

2.1.8 KEBIJAKAN K3

Kebijakan K3 pada perusahaan diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Terdapat kebijakan

K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3. Kemudian Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat. Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus. Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-undangan (PP No.50 Tahun 2012).

Dalam pengembangaan kebijakan K3 yang berisi informasi tentang organisasi dan prinsip kinerja K3 harus terdapat adanya komitmen dari senior manajemen adalah hal yang sangat penting untuk pengembangan dan peningkatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini disebabkan karena senior manajemen sebagai pemegang kendali dan komitmen kepada seluruh tenaga kerja, dan pemegang saham.

2.1.9 IDENTIFIKASI BAHAYA (*HAZARD IDENTIFICATION*)

Identifikasi bahaya adalah suatu proses yag dapat dilakukan untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja (Tarwaka, 2014). Identifikasi potensi bahaya ditempat kerja disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kegagalan komponen
2. Kondisi yang menyimpang
3. Kesalahan manusia dan organisasi

4. Pengaruh kecelakaan di luar
5. Kecelakaan akibat adanya sabotase (Tarwaka, 2014).

Mengidentifikasi sumber risiko berupa bahan, mesin yang digunakan, alat yang ada, prosedur yang harus dilakukan serta tipikal manusia yang terlibat didalamnya (Widowati, 2017). Dalam identifikasi risiko harus melakukan :

1. Mencakup pemeriksaan dari konsekuensi tertentu.
2. Menyusun dan menerapkan alat-alat atau instrumen identifikasi risiko dan metode yang sesuai dengan tujuan serta kemampuan organisasi dalam menghadapi besar kecilnya risiko.
3. Orang dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk mengidentifikasi risiko sesuai dengan jenis risiko (Widowati, 2017).

Untuk mengetahui potensi bahaya di lingkungan kerja dapat menggunakan teknik identifikasi bahaya yang diklasifikasikan sebagai berikut:

2.1.9.1 Teknik Pasif

Bahaya dapat dikenal dengan mudah jika dialami sendiri secara langsung, cara ini bersifat primitif dan terlambat karena kecelakaan setelah terjadi, baru dikenal dan diambil langkah pencegahannya. Teknik atau metode ini sangat rawan, karena tidak semua bahaya dapat menunjukkan eksistensinya, sehingga dapat terlihat dengan mudah (Ramli, 2010).

2.1.9.2. Teknik Semi Proaktif

Teknik ini disebut juga belajar dari pengalaman orang lain, karena tidak perlu dialami sendiri setelah itu baru mengetahui adanya bahaya. Namun teknik ini kurang efektif karena:

1. Tidak semua bahaya telah diketahui atau pernah menimbulkan dampak kejadian kecelakaan.
2. Tidak semua kejadian dilaporkan atau diinformasikan kepada pihak lain untuk diambil sebagai pelajaran.
3. Kecelakaan kerja telah terjadi yang berarti tetap menimbulkan kerugian, walaupun menimpa pihak lain (Ramli, 2010).

2.1.9.3 Metode Proaktif

Metode terbaik untuk mengidentifikasi bahaya adalah cara proaktif atau mencari bahaya sebelum bahaya tersebut menimbulkan akibat atau dampak yang merugikan. Tindakan proaktif memiliki kelebihan, antara lain (Ramli, 2010):

1. Bersifat *preventif* karena bahaya dikendalikan sebelum menimbulkan kecelakaan atau cidera.
2. Bersifat peningkatan berkelanjutan (*continual improvement*) karena dengan mengenal bahaya dapat dilakukan upaya perbaikan.
3. Meningkatkan *awarness* setiap pekerja setelah mengetahui dan mengenal adanya bahaya di sekitar tempat kerjanya.
4. Mencegah pemborosan yang tidak diinginkan, karena dengan adanya bahaya dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Ramli (2010) teknik identifikasi bahaya bersifat proaktif, yaitu:

1. Data kejadian
2. Daftar periksa
3. *Brainstroming*
2. *What If Analysis*

3. HAZOPS (*Hazards and Operability Study*)
4. Analisa Moda Kegagalan dan Efek (*Failure Mode and Effect Analysis*)
5. *Task Analysis*
6. *Event Tree Analysis*
7. Analisa Pohon Kegagalan (*Fault Tree Analysis)*
8. Analisa Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*).

2.1.10 PENGENDALIAN RISIKO (*RISK CONTROL*)

Menurut Ramli (2010b) pengendalian risiko merupakan langkah yang menentukan dalam keselurahan manajemen risiko. Sedangkan menurut Widowati (2017) Pengendalian risiko berperan dalam meminimalisir atau mengurangi tingkat risiko yang ada sampai tingkatan yang dapat di tolerir. Cara pengendalian risiko K3 dapat dilakukan melalui: (Widowati, 2017)

2.1.10.1 Eliminasi

Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas pertama (Ramli, 2010). Pengendalian ini dilakukan dengan cara menghilangkan sumber bahaya (Widowati, 2017). Eliminasi dapat lakukan dengan memindahkan objek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat diterima oleh ketentuan, peraturan atau standar baku K3 atau kadarnya melampaui nilai ambang batas (NAB) yang diperkenankan (Tarwaka, 2014).

2.1.10.2 Substitusi

Subtitusi adalah teknik pengendalian bahaya dengan mengganti alat, bahan, sistem atau prosedur yang berbahaya dengan yang lebih aman atau lebih rendah bahayanya (Ramli, 2010). Sedangkan menurut Tarwaka (2014) substitusi didefinisikan sebagai pengendalian yang dimaksudkan untuk menggantikan mesin atau peralatan kerja mesin yang lebih berbahaya dengan mesin atau peralatan kerja mesin yang kurang berbahaya atau yang lebih aman, sehingga keberadaanya selalu dalam batas yang masih dapat diterima dan aman dalam setiap operasi.

2.1.10.3 *Engineering*

Pengendalian ini dilakukan dengan cara mengurangi risiko dari bahaya dengan metode rekayasa teknik pada alat, perkakas, mesin, infrastuktur, lingkungan, dan atau bangunan (Widowati, 2017). Rekayasa teknik merupakan upaya pengendalian dengan merubah struktur objek kerja mesin atau peralatan kerja mesin untuk mencegah seseorang kontak kepada potensi bahaya, seperti pemberian pengaman mesin, penutup ban berjalan, pembuatan struktur pondasi mesin dengan cor beton, pemberian alat bantu mekanik, pemberian absorber suara pada dinding ruang mesin yang menghasilkan kebisingan tinggi sekali sebagai pengaman mesin, dan lain-lain (Tarwaka, 2014).

2.1.10.4 Administratif

Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang kontak langsung dengan potensi bahaya. Metode ini mengurangi risiko bahaya dengan cara melakukan pembuatan prosedur (SOP), instruksi kerja (IK), pemasangan rambu (*safety sign*),

seleksi terhadap kontraktor atau staf yang terlibat pada suatu proses kerja tertentu, pengaturan dan monitoring penggunaan material, alat, dan mesin, penyimpanan dan pelabelan, adanya jalur evakuasi. Termasuk upaya pembatasan lama waktu paparan, pemeriksaan kesehatan, dan rotasi kerja (Widowati, 2017).

2.1.10.5 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu kewajiban di mana biasanya pekerja atau buruh bangunan yang bekerja di sebuah proyek atau bangunan yang bekerja disebuah proyek atau pembangunan sebuah gedung, diwajibkan menggunakannya. Alat pelindung Diri (APD) berperan penting terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (Anizar, 2012).

Pengendalian ini dilakukan dengan cara mengurangi risiko bahaya dengan cara menggunakan alat pelindung diri, misalnya: *safety helmet*, masker, sepatu *safety*, *coverall*, kacamata keselamatan, *body harness*, dan alat pelindung diri lainnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan (Widowati, 2017).

2.1.11 INSPEKSI K3

Program inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang efektif merupakan suatu program pencegahan yang sangat penting yang dapat dilakukan untuk menjamin agar lingkungan kerja selalu aman, sehat, dan selamat. Inspeksi dapat dilakukan melalui beberapa bentuk dan cara dan dapat diklasifikasikan menurut tujuan inspeksi yang akan dilakukan. Jenis inspeksi pada umumnya meliputi:

1. Inspeksi informal

2. Inspeksi terencana terdiri dari Inspeksi umum atau inspeksi rutin terhadap sumber-sumber bahaya (hazard) di tempat kerja secara menyeluruh, dan inspeksi khusus.

   Inspeksi khusus meliputi :

1. Inspeksi khusus terhadap objek-objek atau area tertentu, yang mempunyai risiko tinggi terhadap kerugian dan kecelakaan kerja,
2. Inspeksi khusus yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan atau complain dari tenaga kerja di suatu unit kerja,
3. Inspeksi khusus yang dilakukan berdasarkan adanya permintaan atau instruksi dari pengurus perusahaan (Tarwaka, 2014).

Menurut Bird and Germain (1986) dalam Tarwaka (2014) bahwa inspeksi merupakan suatu cara terbaik untuk menemukan masalah-masalah dan menilai risikonya sebelum kerugian atau kecelakaan dan penyakit akibat kerja benar-benar terjadi. Program inspeksi harus dilakukan secara terstruktur dan mempunyai beberapa tujuan umum seperti:

1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang potensial yang tidak terantisipasi selama proses desain ataupun selama analisa tugas-tugas/pekerjaan.
2. Mengidentifikasi defisiensi atau ketidakfungsian mesin-mesin dan peralatan kerja.
3. Mengidentifikasi kondisi lingkungan kerja dan tindakan-tindakan tidak aman atau tidak sesuai dengan prosedur kerja.
4. Mengidentifikasi pengaruh dari perubahan proses produksi atau perubahan material.

5. Mengidentifikasi tindakan korektif yang kurang tepat yang dapat menimbulkan masalah lain di tempat kerja.
6. Menyediakan informasi K3 untuk bahan evaluasi diri bagi manajemen perusahaan.
7. Mendemonstrasikan komitmen manajemen melalui tindakan nyata dalam bidang K3 di tempat kerja.

Sistem inspeksi harus direncanakan dan dibicarakan secara bersama-sama antara pihak manajemen dengan pihak perwakilan pekerja yang tergabung dalam P2K3. Dengan demikian sistem inspeksi akan dapat berjalan secara efektif karena didukung oleh kedua belah pihak. Sistem inspeksi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pembatasan secara jelas ruang lingkup inspeksi.
2. Teknik inspeksi yang akan dilakukan.
3. Bentuk laporan inspeksi yang tepat.
4. Penetapan atau penunjukan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan inspeksi.
5. Penunjukan orang yang harus bertanggung jawab di dalam inspeksi untuk menjamin agar langkah-langkah perbaikan yang telah direkomendasikan sampai ke pihak manajemen dan segera diimplementasikan secara bersama sama.
6. Langkah-langkah praktis yang harus diambil untuk menjamin bahwa tindakan korektif telah diimplementasikan sesuai yang direkomendasikan.
7. Peninjauan ulang atau review untuk mengetahui bahwa tindakan korektif yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

2.5.1 Tujuan inspeksi

1. Inspeksi K3 di tempat kerja secara sistematis mempunyai peran penting di dalam upaya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap sumbersumber bahaya K3. Permasalahan-permasalahan K3 akan dapat dideteksi secara lebih awal untuk resolusi sebelum kecelakaan dan penyakit akibat kerja benar-benar terjadi.
2. Inspeksi dilakukan untuk menjamin agar setiap tempat kerja berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, norma, maupun petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang K3 yang ditetapkan oleh pemerintah maupun kebijakan perusahaan.
3. Inspeksi secara regular dan khusus akan dapat digunakan sebagai bahan diskusi dengan tenaga kerja terhadap isu-isu K3 yang sedang dihadapi oleh mereka. Tenaga kerja merupakan orang yang paling mengenal terhadap aspek kerja, peralatan, mesin-mesin, dan proses operasional di tempat kerja sehingga mereka merupakan sumber informasi yang berharga. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang lancar antara manajemen dengan tenaga kerja akan dapat memperbaiki performansi atau kinerja K3 di perusahaan (Tarwaka, 2014).

2.1.12 INTERNAL AUDIT SMK3

2.1.12.1 Definisi Audit Internal SMK3

Internal audit SMK3 menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah

direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3. Melalui audit organisasi akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat melakukan langkah-langkah penyempurnaan berkesinambungan.

Audit internal SMK3 dilakukan secara berlaka. Pelaksanaan audit SMK3 dilakukan secara sistematis dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematis dan efektif oleh pihak manajemen.

2.1.12.2 Sertifikasi Tingkat Pencapaian Audit SMK3

Pada pasal 16 (1) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 menyatakan bahwa penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk efektivitas pencapaian audit SMK3, audit harus dilakukan oleh badan audit independen atau eksternal audit. Selanjutnya pada pasal 16 (3) dinyatakan audit SMK3 meliputi 12 unsur atau elemen audit, yaitu :

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen (26 kriteria).
2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 (14 kriteria).
3. Pengendalian, perancangan dan peninjauan kontrak (8 kriteria).
4. Pengendalian dokumen (7 kriteria).
5. Pembelian dan pengendalian produk (9 kriteria).
6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 (40 kriteria).
7. Standar pemantauan (17 kriteria).
8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan (9 kriteria).
9. Pengelolaan material dan perpindahannya (12 kriteria).

10. Pengumpulan dan penggunaan data (6 kriteria).

11. Pemeriksaan sistem manajemen K3 (3 kriteria).

12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan (13 kriteria).

Untuk pelaksanaan audit, maka kedua belas elemen tersebut dibuat pedoman teknis audit sistem manajemen K3 seperti yang tertuang pada lampiran II Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012. Sedangkan, sertifikasi pencapaian audit sistem manajemen K3 sesuai dengan lampiran II C Peraturan Pemerintah RI No.50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, dibagi 3 tingkatan pencapaian, yaitu:

2.1.12.2.1 Kategori Tingkat Awal (Initial Level)

Yang lebih ditunjukan untuk perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat risiko rendah. Pada tingkat awal perusahaan harus menerapkan sebanyak 64 kriteria audit dari elemen ke-1 s/d elemen ke-12.

2.1.12.2.1 Kategori Tingkat Transisi (Transition Level)

Ditunjukan bagi perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat risiko menengah. Pada tingkat transisi perusahaan harus menerapkan sebanyak 64 kriteria tingkat awal dan ditambah dengan 58 kriteria baru dengan total 122 kriteria audit dari elemen ke-1 s/d elemen ke-12.

2.1.12.2.3 Kategori Tingkat Lanjutan (Advanced Level)

Ditunjukan bagi perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat risiko tinggi. Pada tingkat lanjutan perusahaan harus menerapkan keseluruhan 64 kriteria tingkat awal ditambah dengan seluruh 58 kriteria tingkat transisi dan

ditambah lagi dengan 44 kriteria baru dengan total 166 kriteria audit dari elemen ke-1 s/d elemen ke-12.

Sedangkan, tingkat keberhasilan pencapaian SMK3 diukur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

Tabel 2.1 Penilaian Tingkat Penerapan SMK3

Kategori	**Tingkat Prncapaian Penerapan**		
	0-59%	60-84%	85-100%
Kategori Tingkat Awal	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori Tingkat Transisi	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori Tingkat Lanjutan	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

2.2 KERANGKA TEORI

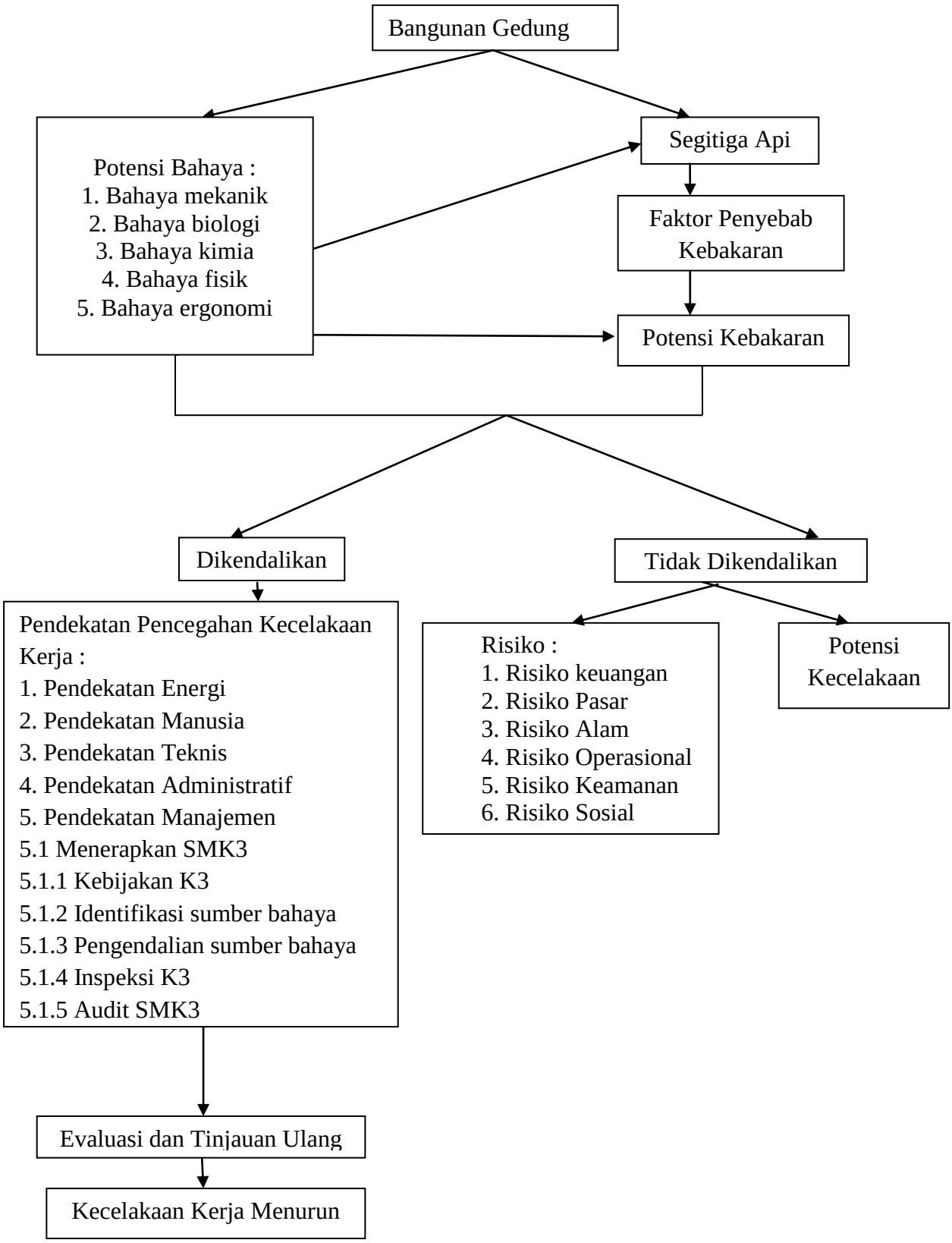

Sumber : Permen Pu No.26 Tahun 2008 , Juwana (2005), Tarwaka (2014), Suwandi (2018), Anizar (2012), Ramli (2010),PP No.50 Tahun 2012, Widowati (2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. ALUR PIKIR

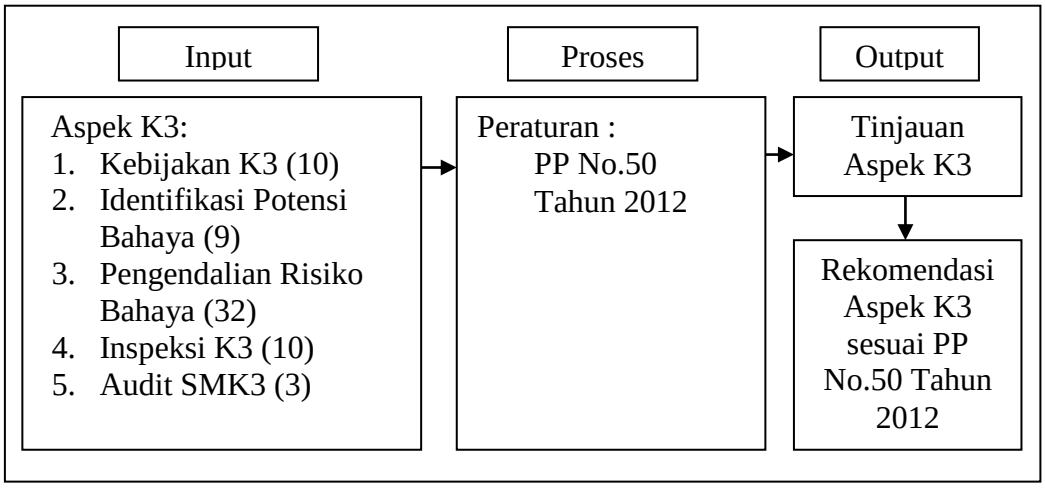

Gambar 3.1. Alur Pikir

3.2. FOKUS PENELITIAN

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2015). Fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah no.50 tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang.

3.3. JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data hasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun data yang

dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, dokumen tertulis, dan gambar (Moleong, 2010).

3.4 SUMBER INFORMASI

Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut :

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2015). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari proses observasi yang menggunakan lembar observasi dan proses wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010).

3.4.1.1 Pengamatan (Observasi)

Pengamatan merupakan suatu prosedur yang terencana, yang meliputi melihat, mendengar, serta mencatat sejumlah dan taraf aktivitas atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Notoatmodjo, 2010). Teknik pengamatan atau observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengamatan sistematis yaitu jenis pengamatan ini mempunyai kerangka atau struktur yang jelas, dimana di dalamnya berisikan faktor yang diperlukan, dan sudah dikelompokkan ke dalam kategori-kategori (Notoatmodjo, 2010).

Pengamatan atau observasi lapangan ini dilakukan untuk meninjau aspek keselamatan dan kesehatan kerja di Java *Supermall* Semarang.

3.4.1.2 Wawancara

Menurut Notoatmodjo (2010) wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana keterangan atau informasi didapatkan secara lisan dari seorang sasaran penelitian (responden) atau bercakap cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (*face to face*).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Sugiyono (2015), sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Adapun kriteria sampel sebagai informan yang ditentukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Karyawan atau pekerja di Java *Supermall* Semarang
2. Mengetahui sistem manajemen K3 di Java *Supermall* Semarang
3. Bersedia diwawancarai

Berdasarkan hasil analisis kriteria tersebut informan yang terpilih dalam penelitian ini meliputi:

3.4.1.2.1 Manager Operasional

Memenuhi semua kriteria, yaitu karyawan di Java Supermall Semarang, mengetahui SMK3 di Java *Supermall* Semarang, dan bersedia diwawancarai.

3.4.1.2.2 Penanggungjawab MKG

Memenuhi kriteria 1 dan 3, yaitu karyawan di Java *Supermall* Semarang, dan bersedia diwawancarai.

3.4.1.2.3 Divisi Security

Memenuhi kriteria 1 dan 3, yaitu karyawan di Java *Supermall* Semarang, dan bersedia diwawancarai.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Java *Supermall* Semarang, meliputi profil perusahaan, SOP, dokumen inspeksi, data *traffic customer* Java *Supermall* Semarang, dan dokumen lain yang mendukung terkait dengan aspek K3 di Java *Supermall* Semarang.

3.5. INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA

3.5.1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, yang dapat berupa: kuesioner, formulir observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan lain sebagainya (Notoatmodjo, 2010). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

3.5.1.1 *Human Instrument*

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti menjadi segalanya dalam proses penelitian. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan menjadi pelapor hasil dari penelitiannya (Moleong, 2010).

3.5.1.2 Lembar Pengamatan (Observasi)

Lembar pengamatan merupakan instrumen yang digunakan pada saat melakukan pengamatan atau observasi dilapangan. Lembar pengamatan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan PP no.50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lembar pengamatan ini digunakan untuk mencatat hasil observasi di lapangan, yaitu untuk meninjau aspek K3 di Java *Supermall* Semarang.

3.5.1.3 Pedoman Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawacara semi terstruktur (*semi structure interview*), yaitu wawancara yang dalam pelaksanaanya lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2015). Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dalam meninjau aspek K3 di Java *Supermall* Semarang. Dalam pelaksanaan wawancara, digunakan bantuan alat-alat agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan sebagai bukti telah melakukan proses wawancara. Alat-alat bantu tersebut sebagai berupa alat perekam, buku catatan, kamera, dan pedoman wawancara.

3.5.2 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: teknik pengambilan data primer dilakukan dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara dengan informan utama dan informan pendukung, sedangkan teknik pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang terdapat di Java *Supermall* Semarang.

3.6. PROSEDUR PENELITIAN

Pada penelitian kualitatif terdapat 3 tahapan dalam melakukan penelitian, yaitu:

3.6.1. Tahap Pra Penelitian

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahap pra penelitian, antara lain:

1. Menetapkan lokasi atau tempat penelitian, yaitu di Java *Supermall* Semarang.
2. Mengurus perizinan untuk penelitian.
3. Melakukan survei pendahuluan yang dengan melakukan observasi awal dan melalui data sekunder yang ada di perusahaan, seperti profil perusahaan.
4. Melakukan diskusi dan konsultasi dengan pihak perusahaan berkaitan dengan usulan judul penelitian yang akan dilakukan.
5. Menyusun proposal penelitian.
6. Membuat instrumen penelitian.
7. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk penelitian.

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian, antara lain:

1. Melakukan pengecekan perlengkapan untuk penelitian, lokasi penelitian dan mempersiapkan diri.
2. Melaksanakan penelitian.
3. Melakukan pengamatan atau observasi lapangan di Java *Supermall* Semarang.
4. Mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan.
5. Melakukan wawancara dengan informan yang sudah dipilih.

3.6.3 Tahap Pasca Penelitian

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis data atau pasca penelitian, antara lain:

1. Melakukan pengolahan dan analisis data dari hasil pelaksanaan penelitian
2. Menyusun laporan penelitian

3. Membuat kesimpulan dan rekomendasi di laporan penelitian.

3.7 PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2015), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan satu dengan informan yang lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Patton, 1987 dalam Moleong, 2010).

Teknik triangulasi dalam pengumpulan data dibedakan menjadi 2, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, sedangkan triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data mengenai gambaran sarana penyelamatan, peneliti menggunakan triangulasi teknik yang berupa pengamatan (observasi, wawancara, dan analisis dokumen), serta triangulasi sumber yang diperoleh dari informan.

3.8. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami (Sugiyono, 2015).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, analisis data sudah dilakukan terhadap jawaban yang diberikan oleh informan. Apabila jawaban dari informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2015).

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman adalah:

3.8.1 *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dengan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya atau mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2015).

3.8.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah analisis data berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan

data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2015).

3.8.3 *Conclusion Drawing atau Verification*

Setelah melakukan analisis data maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara yang akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang bersifat baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2015). Data yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi, dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis* (deskriptif isi) karena untuk meninjau aspek K3 di Java *Supermall* Semarang.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Tinjauan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di Java *Supermall* Semarang" maka didapatkan simpulan Java *Supermall* Semarang telah melaksanakan 45 dari total 64 butir aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 atau 70,3 % pencapaian penerapan tingkat awal, dan termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik.

Kriteria yang belum terpenuhi oleh Java *Supermall* Semarang dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara garis besar antara lain: (1) perusahaan belum membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), (2) belum pernah melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan K3 dan pengendalian risiko K3, (3) belum lengkapnya dokumen terkait pengendalian risiko K3 dan inspeksi K3, (4) belum ada pengesahan dokumen terkait K3, (5) belum lengkapnya APD seperti *safety goggles*, (6) kurangnya jumlah APAR pada tiap lantai, (7) belum mempunyai petugas P3K, dan (8) belum pernah melaksanakan audit internal SMK3.

6.2 Saran

Saran yang harus dilakukan oleh Java *Supermall* Semarang adalah meningkatkan penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dengan melakukan perbaikan pada kriteria yang belum sesuai yaitu:

1. Membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) yang anggotanya terdiri dari ketua P2K3 yang dipilih oleh pimpinan/ salah satu pihak manajemen, sekretaris P2K3 yang merupakan ahli K3, dan keanggotaan P2K3 yang berasal dari perwakilan manajemen.
2. Melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan K3 dan pengendalian risiko K3.Peninjauan ulang secara formal dicatat dan didokumentasikan agar dapat dilakukan peningkatan kinerja K3 secara berkelanjutan.
3. Pengurus harus mengumpulkan data dokumen K3 terkait pengendalian risiko K3 dan inspeksi K3 sehingga dapat dianalisa.
4. Melakukan persetujuan/pengesahan terhadap dokumen terkait K3, seperti kebijakan K3, manual SMK3, SOP, instruksi kerja, dan form pelaporan kejadian.
5. Melakukan *Working Permit* (Izin Kerja) pada pekerjaan/aktivitas yang termasuk *High Risk* yang dilaksanakan secara *kontinue* oleh pelaksana.
6. Memenuhi kebutuhan APD seperti menyediakan *safety goggles* untuk divisi *enggineering*.
7. Menambah jumlah sebanyak 45 APAR pada tiap lantai dengan jarak 15 meter tiap APAR dengan jenis powder.
8. Penunjukan petugas P3K yang telah dilatih yang dapat memberikan pertolongan pertama pada peristiwa kecelakaan/ insiden.

9. Membentuk dan melaksanakan audit internal SMK3. Tim audit internal SMK3 ditunjuk secara resmi oleh pimpinan yang berasal dari perwakilan senior manajer, anggota P2K3, ahli teknis dari operasional, dan ahli K3.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, R. (2016). ANALISIS IMPLEMENTASI UNIT PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KEBAKARAN DI MALL X , JAKARTA. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*, *4*, 603–613.

Ali, T. (2009). Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Bukit Makmur Mandiri Utama Job Site Head Office. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*, *4*, 201–222.

Amri, R. (2016). *Risiko bencana indonesia*. (R. Jati, Ed.). Jakarta: BNPB.

Anizar. (2012). *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

BPJS. (2018). *Data Kecelakaan Pekerja Tahun 2018*. *BPJS*. Semarang.

Christina, W. (2012). PENGARUH BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA PROYEK KONSTRUKSI. *Jurnal Rekayasa Sipil*, *6*(1), 83–95.

Depkes. (2014). No Title. Retrieved June 2, 2019, from http://www.depkes.go.id/article/view/201411030005/1-orang-pekerja-di-dunia-meninggal-setiap-15-detik-karena-kecelakaan-kerja.html

Hazami, A. (2018). Kebakaran di Plasa Kudus. Retrieved from http://m.detik.com/news/berita-jawatengah/d-3887116/pemkab-derita-kerugian-rp-226-m-akibat-kebakaran-di-plasa-kudus

ILO. (2013). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Sarana untuk Produktivitas*. Jakarta.

ILO. (2018). *Manajemen Risiko kebakaran* (Pertama). Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Imaculata, M. (2013). EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PENINGKATAN FASILITAS PT . TRAKINDO UTAMA BALIKPAPAN. *Jurnal Sipil Statik*, *1*(5).

Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rodakarya.

Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pelealu, C. P. (2015). PENERAPAN ASPEK HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi Kasus : Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall). *Jurnal Sipil*, *3*(5), 331–340.

Permenaker. (1996). *Sistem Manajemen K3*. Jakarta: Pemerintah.

Profil Java Supermall Semarang. (2019).

Ramli, S. (2010a). *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.

Ramli, S. (2010b). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.

Restu, S. (2016). TINJAUAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) (Studi kasus : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru). *Jorn FTEKNIK*, *3*(50), 1–11.

Sahab, S. (1997). *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta:

Bina Sumber Daya Manusia.

Santi, N. (2018). *Kebakaran Mal di Rusia*. Jakarta: CNN. Retrieved from https://cnnindonesia.com/internasional/20180326/kebakaran-di-mal-rusia

Semarang, D. K. K. (2018). *Kejadian Kebakaran di Wilayah Kota Semarang pada Tahun 2018*. Semarang.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwandi, & D. (2018). *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gava Media.

Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.